AUTONOME MOLUKSCHE KERK;
Upaya Mendengar Suara yang Terbungkam

Faidah Azuz

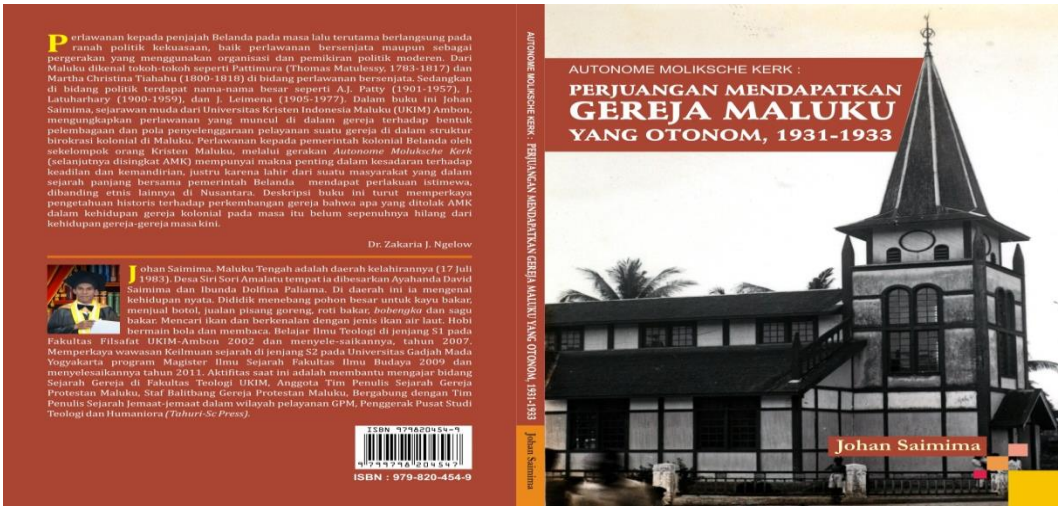

Data buku

Judul : *Autonome Moluksche Kerk*: Perjuangan Mendapatkan Otonomi Gereja Maluku, 1931-1933

Penulis: Johan R. Saimima

Halaman: 144 + xxxi

Tahun : 2012

Penerbit: Penerbit Grafika Indah

ISBN: 979 820 471 – 9

> "Di Ambon AMK lahir sebagai protes terhadap kepemimpinan *Indische Kerk* yang hierarkis, terikat pada birokrasi dan pembiayaan pemerintah, dan kepemimpinannya berada di tangan para pendeta Belanda" (Hal. xiv).
>
> "Dengan diproklamasikannya GPM sebagai sebagai gereja yang otonom, maka gereja Maluku bebas dari intervensi *Indische Kerk* seperti pada masa-masa sebelumya. Melalui

> independensi yang telah dialami itu, GPM mengambil langkah pertama untuk melakukan persidangan Sinode yang pertama pada tanggal 7 September 1935. *Indische Kerk* merupakan gereja yang beraliran Protestantisme dan merupakan penerus Gereja *Gereformeed* (Gereja Protestan Calvinis) di era kekuasaan VOC. Meskipun gereja di Hindia Belanda telah diklaim sebagai gereja Negara sejak tahun 1815, *Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indie* atau *Insdische Kerk* baru dinyatakan resmi berdiri pada 30 November 1844 dalam sidang pertama Pengurus Gereja" (hal: 75, 25).

Tidak banyak orang Maluku berminat menulis sejarah gerejanya sendiri dengan mengulas persoalan ketidakpuasan yang terjadi dalam institusi gereja karena dapat dianggap menghidangkan aib sendiri untuk dilihat orang lain. Namun kekhawatiran terbukanya aib seakan dipatahkan dengan kehadiran buku ini melalui cara berfikir baru jemaat Kristen Protestan Maluku terhadap gereja mereka. Buku ini mengambil ancang-ancang atau posisi yang melawan arus narasi besar (grand narativ) yakni mendudukkan gereja sebagai intitusi yang tidak bebas dari kesalahan atau dominasi. Dengan membuka berbagai aspek kesejarahan antara lain yang membidani lahirnya proses menuju *Autonome Moluksche Kerk* (AMK) tampaknya Saimima hendak menyampaikan pesan bahwa gereja perlu dikontrol dari berbagai arah sehingga dominasi pengurus gereja dapat direduksi sekaligus membuka ruang untuk lebih memberdayakan jemaatnya.

Buku yang berawal dari tesis Saimima pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Tahun 2011 dilengkapi dengan kata pengantar dari Zakaria J. Ngelow, seorang pemerhati sejarah gereja di Indonesia. Ngelow memberikan beberapa catatan permulaan yang sangat membantu pembacanya untuk memahami buku ini (vii-xvi). Salah satu informasi penting yang diberikan Ngelow tentang bagaimana kondisi gereja dan jemaat Kristen di Maluku pada masa VOC sebagai berikut:

> "tidak semua jemaat punya pendeta, sehingga pendeta di salah satu jemaat berkewajiban mengunjungi jemaat secara berkala jemaat-jemaat sekitarnya. Pendeta di Ternate mengunjungi jemaat di Sangir-Talaud; demikian juga pendeta Ambon ke Maluku Tenggara. Di jemaat-jemaat yang tidak mempunyai pendeta ditempatkan guru, yang direkrut dari kalangan orang Ambon yang dipersiapkan secara khusus. Demikianlah gereja pada zaman VOC tidak mendapat pembinaan yang memadai, sehingga berkembang dalam pencampuran dengan berbagai unsur kepercayaan pra-Kristen setempat. Di Maluku pencampuran ini melahirkan apa yang kemudian disebut agama Ambon. Dalam perspektif komunikasi budaya, agama Ambon merupakan kekristenan yang diterima dan diberi bentuk substansi budaya keagaamaan oleh masyarakat Maluku. Dengan kata lain, agama Ambon adalah kontekstualisasi alami (bukan rekayasa) Injil oleh masyarakat Maluku" (hal: ix).

Apa yang disampaikan oleh Ngelow kemudian mendapat penjelasan yang cukup memadai pada bab-bab selanjutnya dari Saimima terutama tentang situasi gereja pada masa VOC. Hal ini terlihat terutama pada bagian dua yang khusus membahas "hilangnya hak kesulungan; perubahan agama asli menjadi agama negara (Kristen) di Maluku dan topik yang diletakkan di bawah judul "Seranjang Berdua; Persetubuhan Negara dan Gereja di Maluku Sejak Lahir dan Berkembang pada Zaman Hindia-Belanda (hal. 21-28). Pembahasan bagian kedua ini menjadi latar belakang pengungkapan sejarah tentang bagaimana agama Kristen menjadi agama Negara yang dengan posisi sebagai demikian, segala pengurusan gereja (*Insdische Kerk)* mengikuti hirarki urusan negara termasuk pendanaan dan sistem koordinasi pengambilan kebijakan penyebaran agama Kristen di Maluku beriringan dengan bidang pendidikan (hal. 2). Jika dilihat sekilas, tidak ada yang salah dengan pola penanganan keberagamaan tersebut apatah lagi harus diakui bahwa VOC lah yang membawa agama Kristen di Maluku. Tetapi ketika pola pengaturan hirarki Negara yang diterapkan masuk ke gereja diberlakukan

sedemikian ketat dan kemudian muncul juga semacam perbedaan berdasarkan suku bangsa (dikotomi Belanda dan pribumi di dalam gereja), pada saat itulah muncul protes keras dari beberapa tokoh gereja Maluku yang menamakan diri mereka *Autonome Molukssche Kerk* (hal. 5, 29-44).

Secara lugas Saimima berhasil menelurkan tiga alasan utama mengapa protes dilayangkan oleh jemaat dibawah tajuk *Autonome Molukssche Kerk* atau AMK (hal. 5-7, 50 dan 57). *Pertama*, penolakan terhadap hirarki personal yang pada prakteknya terlalu meninggikan posisi orang Belanda termasuk dalam pelaksanaan sekramen sementara hak sekramen tidak diberikan pada tenaga pelayan lainnya seperti pendeta pribumi, *Goeroe Djemaat*, Utusan Injil dan *Tuagama*. Dalam pandangan AMK, sekramen tidak perlu memilahkan pelayan berdasarkan bangsa. Jika orang Maluku telah memadai untuk melaksanakan sekramen, mengapa hak tersebut tidak diberikan pada orang lokal saja. Memang ada beberapa pengecualian untuk pelayanan sekramen pada tahun 1916 kepada pribumi tetapi kesempatan itu hanya berlaku pada pendeta pribumi yang telah melayani sekitar 10 tahun.

Kedua, dalam menjalankan tugas struktural gereja, para utusan Injil, *Goeroe Djemaat*, dan pendeta pribumi diwajibkan setiap tahunnya memberikan laporan tugas mereka kepada pendeta bantu. Kemudian pendeta bantu melapor kepada pendeta ketua, dan pendeta ketua pada gilirannya melapor ada pengurus *Insdiche Kerk* di Batavia. Sistem pemerintahan gereja yang bertingkat-tingkat ini masih tetap ingin diterapkan oleh Van Oostrom Soede pada tahun 1931 sebagai pendeta ketua Resort Amboina yang bertugas dari tahun 1926-1932.

Ketiga, AMK berjuang untuk melakukan reformasi terhadap pedoman dan pengakuan dalam *Insdiche Kerk*. Bagi AMK, pedoman dan pengakuan (*ikrar*) gereja Maluku harus berdasar pada Alkitab, menerima janji Allah yang suci, Pengakuan iman Rasuli, dan dua belas artikel iman Kristen. Kemudian formula penginjilan menurut versi *Insdiche Kerk* yaitu penginjilan yang berfokus pada orang Protestan diubah dengan formula baru yaitu penginjilan oleh Jesus Kristus untuk orang Maluku. Singkatnya, AMK menginginkan kekristenan yang sesuai dengan konteks orang Ambon bukan kekristenan Barat. Tiga hal inilah yang

mendasari AMK melakukan protes kepada *Insdiche Kerk* dan segera melakukan reorganisasi gereja.

Ihwal protes internal ini, dapat juga ditemui dalam banyak agama lain. Apa yang dilakukan oleh AMK di Maluku, sesungguhnya mirip dengan komunitas Kristen Simalungun yang melakukan perlawanan menuju gereja Kristen yang berwajah lokal Simalungun, juga komunitas Islam adat di Hatuhaha Pelauw, bahkan keinginan menjadikan gereja Katolik yang lebih mengindonesia (Sinaga, 2004; Rumahuru, 2012; Boelaars, 2005).

Tampaknya Saimima melihat bahwa protes AMK terhadap dominasi gereja Belanda perlu dibingkai dalam pigura nasionalisme sebagai embrio Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas ketika Saimima menghubunbgkan perjuangan AMK dengan Sarikat Ambon yang dapat ditelusuri seperti kutipan ini:

> "Dapat dikatakan bahwa gerakan yang dilakukan oleh AMK pada zamannya tidak terlepas dari semangat nasionalisme yang terbentuk di Maluku. Cerminan nasionalisme itu tergambar melalui keinginan orang-orang Maluku untuk lepas dari ketergantungan terhadap Belanda dan menjadi daerah yang merdeka, h.30) Bangunan nasionalisme tersebut hadir sejak tahun 1923 melalui organisasi Sarekat Ambon yang beraksi di Ambon sebagai organisasi politik yang pertama bagi orang-orang Ambon. Organisasi ini dibentuk oleh A.J. Patty pada tanggal 9 Mei 1920 di Semarang. Sarekat Ambon bertujuan untuk memajukan kemakmuran penduduk dari *Residentie* Ambon tanpa batas agama, baik secara rohaniah maupun jasmaniah. Kehadiran Sarekat Ambon di kepulauan Ambon disertai dengan propaganda yang kuat untuk untuk melawan kolonial sampai tahun 1933.

> Melalui kehadiran Sarekat Ambon beserta propaganda yang dilakukannya, Sarekat Ambon memiliki peranan yang besar untuk menghidupkan semangat persatuan nasional dan kemerdekaan nasional. Orang-orang Ambon di Jawa bisa mengerti jiwa nasionalisme Indonesia karena usaha-usaha tersebut, h.34) Begitu juga orang-orang Ambon di Maluku sendiri bisa mengerti jiwa nasionalisme untuk melawan diskriminasi kolonialisme di Maluku. Perlawanan keagamaan yang berbentuk protes AMK terhadap pengurus *Indische Kerk* dan keberadaannya di Maluku merupakan representasi dari jiwa nasionalisme itu (Hal. 6-7).

Dalam artikulasi lain, perjuangan AMK merupakan bentuk perlawanan melawan dominasi kolonialisme dalam gereja. Dari sini dapat dilihat ada kemungkinan AMK mendapat inspirasi dari perjuangan yang dilakukan oleh A.Y. Patty di Semarang. Perbedaan keduanya terletak pada medan perjuangan. Jika AMK memilih jalan protes internal gereja terhadap dominasi kolonial, maka AY. Patty melalui Sarekat Ambon mengambil jalur politik untuk memangkas dominasi kolonial. Sayangnya, buku ini tidak berhasil menyajikan argumen yang kuat tantang bagaimana saling silang ide tersebut terjadi. Padahal inilah bagian yang cukup penting untuk dimasukkan dalam buku AMK. Meskipun begitu, buku ini menyimpan potensi kajian aspek sosiologis yang menjanjikan. Misalnya saja dengan menambahkan ranah perjuangan Sarikat Islam dan ranah yang diperjuangan oleh AMK. Dari sini akan terlihat perbedaan ranah yang dengan demikian memiliki konsekuensi logis akan perbedaan modal yang dipertaruhkan oleh keduanya. Teori *Strukturalis generatif* dari Bourdieu (Bourdieu 2010) memungkinkan dilanjutkannya pembahasan dalam lintasan yang diakronis. Kelemahan buku yang ditulis oleh Saimima dalam pandangan saya sekaligus menjadi jalan pembuka untuk dilakukan kajian lanjutan dalam ranah sosiologi, sehingga pembicaraan tentang AMK dan Sarikat Ambon atau lebih luas lagi dalam konteks nasionalisme Indonesia dapat terakomodasi.

AMK menginginkan bentuk kemandirian gereja yang bertumpu pada jemaat. Dengan kemandirian ini, jemaat bertanggungjawab untuk mengurusi dan mengatur gereja (bukan majelis gereja sendiri) dan mengelola anggaran gerejanya. Dalam pandangan AMK, jemaat memiliki kuasa penuh yang sama dengan sinode (struktur teratas dari kepeimpinan gereja setelah klasis) di dalam gereja. Kebutuhan jemaat harus diutamakan dan dipentingkan dalam gereja, bukan pengurus klasis atau pengurus sinode (h:49).

Pada perjalanan mengusung protesnya, AMK mendapat perlawanan bukan saja dari *Insdiche Kerk* tetapi juga dari orang-orang Kristen Ambon yang pro Belanda. Pada rapat Pengurus Gereja, AMK dinilai sebagai gerakan anti gereja. Mereka dianggap telah melakukan kesalahan dalam gereja. Meskipun demikian, AMK dinilai sebagai satu tanda dari kemandirian gereja tetapi mereka tidak boleh bersikap menentang gereja. Status quo ini kemudian menjadikan suara perlawanan AMK mulai kehilangan gemanya. Walau secara organisatoris AMK meredup, tetapi pada akhirnya keinginan AMK tercapai dengan keptusan pada rapat *Insdiche Kerk* tgl 17 Mei 1933 yang menyatakan pemisahan gereja dan negara secara administrasi, sementara pemisahan keuangan masih ditangguhkan. Otonomisasi gereja secara berangsur mulai menampakkan hasilnya, dan bukankah ini merupakan spirit perjuangan AMK juga?

Ada beberapa bagian dari buku ini yang tampaknya sengaja tidak dituntaskan oleh Saimima dan membiarkannya sebagai misteri. Misalnya pada fragmen tokoh dibalik pendirian AMK seperti yang tertera di bawah ini:

> "*Autonome Moluksche Kerk* lahir pada tahun 1932 dengan pendirinya Ny. Njio Kiek Tien, anak dari seorang pendeta Belanda yang bersuamikan seorang Cina, yang hidupnya tidak banyak bergaul dengan orang-orang sekitarnya. Ia adalah seorang perempuan yang mempunyai semangat yang kuat untuk menentang *Indische Kerk* di Maluku sehingga pada tahun 1933 dirinya diangkat sebagai sekretaris gerakan AMK. Njio Kiek Tien mempunyai pandangan politik yang besar terhadap realitas yang dihadapinya berkaitan dengan kekuasaan

> negara atas gereja. Sebuah penghinaan yang besar baginya ketika melihat masyarakat dibuat berbeda karena ras. Sebenarnya pendiri AMK ini masih perlu dipertanyakan. Apakah orang secara pribadi yaitu Njio Kiek Tjien atau kelompok secara kolektif ? Nama Njio Kiek Tjien sendiri tidak tercantum pada data pendirian AMK tahun 1932 di antara tokoh-tokoh yang pertama yang menjadi Pengurus pusat. Pada rapat pertama AMK tanggal 11 Februari 1932, tercantum nama-nama Pengurus Pusat (*hoofdbestuur)* dari AMK, antara lain: B.C. Wattimena (Ketua), L. Pattij (Sekretaris), dan enam anggota yaitu J. Manuputty, P. Paais, C.S. Parera, B. Haumahu, D. Pattikawa dan D. Laisina. Namun, sebagai seorang yang pernah menjadi sekretaris AMK pada tahun 1933 dan karena perannya yang besar bagi AMK, nama dari Njio Kiek Tjien ini selalu muncul pada arsip sebagai pelopor gerakan AMK" (Hal. 43-44).

Peran Ny. Njio Kiek Tjien yang diredam dengan tidak memasukkan namanya dalam nota pendirian AMK, sesungguhnya dapat menjadi pintu masuk lain bagi kajian yang sosiologis sifatnya dengan menggunakan pendekatan postkolonial atau postfeminism. Pertanyaan besar yang perlu diajukan adalah mengapa nama pendirinya (Ny. Njio Kiek Tjien) justru tidak dimasukkan dalam nota pendirian AMK. Pertanyaan ini melahirkan banyak lagi anak pertanyaan yang jika dielaborasi, akan memberikan gambaran yang utuh tentang AMK.

Dalam konteks kekinian, buku ini menyimpan sebuah pertanyaan besar yakni apakah sistem organisasi gereja "Presbiterial-Sinodal" sudah benar-benar tidak lagi berwajah kolonial ataukah justru masih melanggengkan posisinya sebagai pengatur gereja dan jemaat yang sangat dominan. Agaknya, perjuangan untuk mendengar suara yang terbungkam masih perlu terus menerus dilalukan. Terlepas dari apakah itu suara jemaat yang marginal, suara para perempuan yang masih sumbang untuk diangkat, ataukah suara-suara lain yang kerap dapat

didengar keluar dari jendela-jendela gereja yang megah. Untuk berbagai kepentingan itulah spirit AMK tak boleh padam.

Bacaan Penunjang:

Boelaars, Huub, JWM., 2005. *Indonesianisasi: Dari Gereja Katolik di Indonesia menjadi Gereja Katolik Indonesia.* Kanisuis. Yogyakarta.

Rumahuru, Yance Zadrak, 2012. *Islam Syariah dan Islam Adat: Konstruksi Identitas keagamaan dan Perubahan Sosial di Kalangan Komunitas Muslim Hatuhaha di Negeri Pelauw. Disertasi pada Program Studi Agama dan Lintas Budaya,* UGM. Yogyakarta.

Sinaga, Martin Lukito, 2004. *Identitas Poskolonial "Gereja Suku" dalam Masyarakat Sipil: Studi tentang Jaulung Wismar Saragih dan Komunitas Kristen Simalungun*. LKiS. Yogyakarta.

Hoevell, WR., 2014. *Sejarah Kepulauan Maluku: Kisah Kedatangan Orang Eropa Hingga Monopoli Perdagangan Rempah*. Ombak. Yogyakarta.